



**PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2026 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2027**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2027**

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja ini disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027. Selain itu, dokumen ini juga menjadi alat ukur (*review*) sejauh mana pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan. Lebih jauh lagi, Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan, panduan dan manfaat bagi pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut mendukung terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027. Semoga semua yang tertuang dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi acuan untuk tahap pembangunan selanjutnya.

Payakumbuh, September 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota

Drs. DEDDY PERMANA, MM

NIP. 19670810 198809 1 002



Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2026

DAFTAR ISI

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 202 Tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-9
1.3 Maksud dan Tujuan	I-12
1.4 Sistematika Penulisan	I-13
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbang Pol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II-41
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II-45
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-93
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota	III-1
3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat	III-2
3.1.3 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	III-2
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Renja Badan Kesbangpol	III-3
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
.....	
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	V-1
BAB VI PENUTUP	V-1
Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kalender Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2026	I-3
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d Tahun 2025	II-3
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II-43
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2025	II-52
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	II-93
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2030.....	III-5
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	III-8
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum ...	III-9
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	III-12
Tabel 3.5	Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025	III-13
Tabel 4.1	Rencana Kerja Menurut Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026.....	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2026.....	IV-50
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama	V-1
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Kunci	V-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 I-9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana Perangkat Daerah menyusun rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Dalam hal ini Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 36 Tahun 2025 perihal Tahapan dan Jadwal Perencanaan Daerah Tahun 2026. Surat Edaran Bupati tersebut dikeluarkan sebagai pedoman:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2027
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2026

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 128, tahapan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan Renja PD.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tenteram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 disusun dengan mengedepankan aspek prioritas terhadap program dan kegiatan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun pertama dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 - 2029 disusun untuk memenuhi target program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2029.

Tahapan dan proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah berdasarkan Lampiran IV Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dibuat oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Tim tersebut telah dibentuk melalui keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/437/BUP-LK/XII/2024 tentang



Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2027

Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio.

Rencana Kerja (renja) dimaksudkan sebagai suatu dokumen perencanaan kerja dan anggaran dalam satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik memuat keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.



Tabel 1.1
Kalender Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A	Persiapan Penyusunan Renja 2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Diverifikasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	Verifikasi Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja Berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan Mempertajam Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif PD Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif yang Ditetapkan di dalam Perkada RKPD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
F	Penetapan Renja PD 2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



Tahap persiapan penyusunan Rencana Kerja meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja, orientasi mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Tahap penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja 2027 berdasarkan Ranwal RKPD dan Renstra OPD, Penyampaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi, Verifikasi Ranwal Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD.

Tahapan penyusunan rancangan Rencana Kerja 2027 meliputi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai Ranwal RKPD dan usulan pokok serta hasil Musrenbang, Penyampaian Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi sebagai Bahan Penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan RKPD dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah meliputi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang Dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang Memiliki Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Bertujuan untuk Memperoleh Masukan dalam Rangka Penajaman Target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2027 meliputi Rancangan Rencana Kerja menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan Mempertajam Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif yang Ditetapkan di dalam Perkada RKPD; Penyampaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi; Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Sudah Selaras dengan Perbup RKPD.

Penetapan Rencana Kerja PD 2027 meliputi Penyampaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Semua Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk Selanjutnya Ditetapkan dengan Perkada; Penetapan Draft Perkada Rencana Kerja menjadi Perkada Rencana Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Perangkat Daerah.

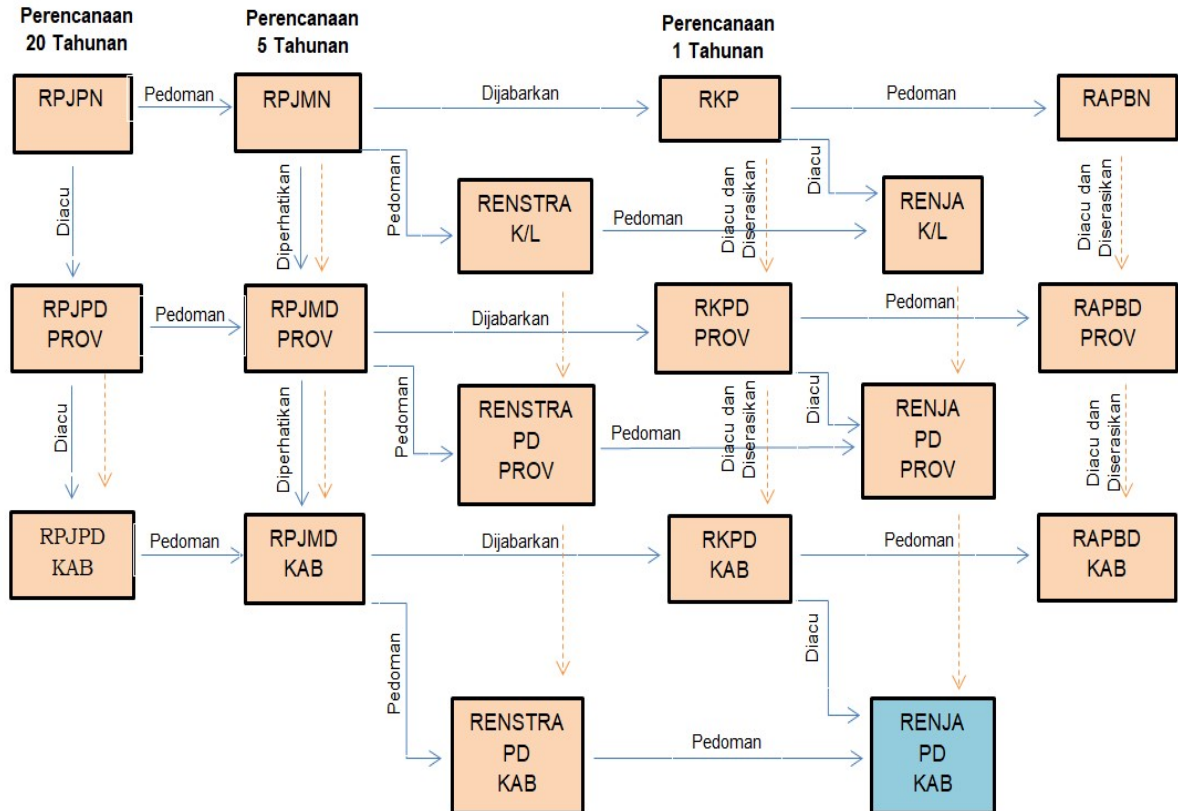
Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan dokumen perencanaan yang lain, tergambar pada diagram berikut ini:

Gambar 1.1



Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2027

Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004



Tahun 2027 merupakan rancangan awal perumusan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang seterusnya akan dituangkan dalam rancangan Pra Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dua kali



Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2027

- terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;



19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 4).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
29. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 41).



30. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 105).
31. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).
32. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 19)
33. Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 000.8.2.4/277/BUP-LK/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2027.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2027.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun disusun mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

- I. *Pendahuluan*, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Landasan Hukum maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- II. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu*, yang memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu (Tahun $n - 2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan ($n - 1$) serta realisasi



rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- III. *Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah*, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2027.
- IV. *Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah*, yang memuat uraian pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sebagai amanat urusan Pemerintahan Umum serta Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- V. *Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*, yang memuat Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan Pemerintahan Umum serta Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- VI. *Penutup*, yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan dana, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan rencana kerja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau realisasi anggaran APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam bagian ini, pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Diantara program dan kegiatan tersebut 5 (lima) program dan 5 (lima) kegiatan merupakan pelaksanaan unsur pemerintahan umum yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya terdapat 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan yang merupakan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Sekretariat Badan Kesbangpol. Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun lalu (n-2), terdapat 1 (satu) program yang mempunyai capaian kinerja yang sesuai target, 2 (dua) program mempunyai capaian melebihi target, dan 2 (dua) program tidak sesuai target. Salah satu program yang tidak tercapai tersebut adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang mana dalam Renja 2026 mempunyai target program sebesar 75,00%, dengan capaian kinerja program Tahun 2026 sebesar 74,15%.



Hal ini dipengaruhi oleh tidak terlaksananya secara maksimal rangkaian kegiatan Forum Kerukunan Umat Baeragama terkait dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dimulai saat pelaksanaan kampanye dan berakhirnya pemilihan Pemilu Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Tahun Anggaran 2026 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 berikut ini.



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pencapaian Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d Tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	95	97,75	103	95	100	100
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	95	96,35	102	95	100	100
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	18	12	6	6	96,35	3	17	100
		Jumlah Dokumen								



Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perencanaan Perangkat Daerah								
2 11 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	6	4	1	0	0	1	5	100
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang disusun								
2 11 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	6	4	1	0	0	1	5	100
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD Perangkat Daerah yang Disusun								
2 11 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	6	4	1	0	0	1	5	100
		Jumlah Dokumen								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		DPA SKPD Perangkat Daerah yang disusun								
2 11 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA yang disusun	6	4	1	0	0	1	5	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang disusun								
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LKJiP, LKPJ, LPPD, SPIP yang disusun	27	19	4	0	0	4	23	44
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	36	24	6	0	0	6	30	33
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	95	99,27	104	95	100	100
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN	192	100	25	25	100	28	125	42



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang dibayarkan								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								
2 11 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan yang tersusun	108	72	18	0	0	-	90	33
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
2 11 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun Badan Kesbangpol	36	24	6	0	0	-	30	53
2 11 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen laporan SPJ Fungsional dan	144	24	24	0	0	-	48	33



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
2 11 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan pronogsis realisasi anggaran	6	1	1	0	0	-	1	33
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	0	0	100	100	100
2 11 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24	16	4	0	0	4	20	33
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	95	100	105	100	100	100
2.11.01.2.05	Pengadaan Pakaian	jumlah stel pakaian	200	-	40	0	0	40	80	40



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02	Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	dinas yang diadakan								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								
2.11.01.2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan	5	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	93.65	93.65	99,58	106	100	98	98
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah paket alat listrik yang diadakan	36	30	6	6	100	6	30	50



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	60	1	1	1	100	2	2	7
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket ATK yang diadakan jumlah jenis alat kebersihan yang	372	248	62	62	100	62	310	37



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		diadakan								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang dicetak Jumlah Lembar Pengadaan	120942	20.157	20.157	20.157	100	20.157	100785	73
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembelian Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (porsi)	3600	2.400	600	543	90,5	600	2434	45
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu								
2 11 01 2.06	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah oh yang	1200	250	200	255	127,5	150	765	55



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
09	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	97.96	95.00	100	105	97.96	99	99
2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang diadakan	16	8	-	-	0	1	11	63
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Disediakan								
2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah kursi tunggu dan kursi tamu yang diadakan	12	1	-	-	0	18	19	25
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								
2 11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	72	5	1	1	100	18	24	22
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						0		
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	90.91	90.91	98,54	108	95	95	95
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Buku Cek	24	14	2	2	100	2	16	67



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	Menyurat	yang disediakan, Jumlah Lembar Materai yang disediakan								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura						12		
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Kali Pembayaran Rekening Telfon, Listrik, Air, Surat Kabar dan TV berlangganan	72	48	12	12	100	12	60	50
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran honor Tenaga Kontrak Khusus dan Tenaga Kontrak Biasa	72	48	12	12	100	12	60	50
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12		
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	94.20	94.20	99,75	105	100	96	96
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kali unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	84	50	12	12	100	12	62	45



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						14	-	-
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kali unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72	12	12	12	100	12	60	47
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						33	-	-
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Paket Pekerjaan	6	1	1	1	100	1	5	50



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-	-	-	1	-	-
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	95.34	85.00	80	100	125	85	90	94
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Ideologi Pancasila dan	95.34	85.00	80	98,78	123,475	85	270	283



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Karakter Kebangsaan	Karakter Kebangsaan								
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah bimtek, sosialisasi, FPK, GNRM	98	5	-	-	88	-	20	20
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	-	-	-	-	-	486	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Peringatan bela negara (lokasi)	48	28	7	6	85	7	34	42
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	-	-	-	-	-	225	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Sejarah Kebangsaan								
8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	180	-	-	-	-	10	10	6
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka					12		12	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
8 01 02 2.01 06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter	-	-	-	-	30	-	30	-
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga					75		75	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara								
8 01 02 2.01 07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka						12		
	Pembentukan	Laporan Hasil	162	28	28	28	100	54	100	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Paskibaraka	Pembentukan Kepaskibrakaan								
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	83.00	78.01	75	72,50	96,67	78.01	85.34	103
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	83.00	78.01	75	99,92	133	78.01	85.34	103



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
8 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	23	85	85	100	117	85	4	17



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	-	-	300	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01 03 2.02 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah sosialisasi banpol dan verifikasi banpol	66	85	75	99,40	132	-	4	6
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	-	-	-	-	-	-	75	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
8 01 03 2.02 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Jumlah bulan dilakukan monitoring Jumlah Kecamatan dilakukan Monitoring	72	48	12	12	100	12	60	50



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	72	48	12	12	100	12	60	50



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	83.00	81.00	75	59	197	75	78	94
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	83.00	81.00	75	59	197	75	156	188
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah ormas yang terdaftar, dibina dan diawasi	200	-	-	-	197	30	119	60



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	-	-	160	-	-
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan	85.00	81.00	75	74,15	98,8	85	240	184



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat								
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat	85.00	81.00	75	74,15	98,8	85	240	184
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Jumlah Rekomendasi / Notulen yang dihasilkan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	144	96	75	74,15	101	24	120	64



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	-		120	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	85.00	81.80	74.74	87,70	117	75	231.54	272
8 01 01 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	85.00	81.80	74.74	87,70	117	75	231.54	272
8 01 06 2.01	Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah	132	88	22	22	53	24	112	33



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
03	di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rekomendasi/Notulen yang dihasilkan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	-	-	-	-	-	560	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah	72	48	12	12	100	12	60	50
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	72	48	12	12	100	12	60	50



Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (n-1), dalam Renja Tahun Anggaran 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.307.271.206,- (*Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*) yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai 6 program 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Dari program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut, pada KUA PPAS Tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 5.095.028.026,- (*Lima Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Dua Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Enam Rupiah*). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 program 10 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.

Selanjutnya pada KUA PPAS Perubahan Tahun 2026, alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar Rp. 4,990,511,879,- (*Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*). Anggaran tersebut direncanakan untuk melaksanakan 6 program 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Adapun realisasi keuangan dari anggaran tersebut adalah sebesar Rp 1.661.172.734,- atau 32,60 % . Dari program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2026, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rencana kegiatan sebanyak 5 kegiatan, telah dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan pada tahun anggaran 2026, diakomodir dalam DPA sebanyak 5 Kegiatan dan DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 5 kegiatan. Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.Target kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam Renja 2026 adalah 100%, dengan capaian kinerja program tahun 2026 sebesar 45, 90%.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan rencana kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan, diakomodir dalam DPA dan DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan. Target kinerja program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Renja 2026 adalah 90%, dengan capaian kinerja program tahun 2026 sebesar 27,95%.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan rencana kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan diakomodir dalam DPA dan DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 sebanyak 1 (satu) kegiatan, yaitu Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan



Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik. Target kinerja program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada tahun 2026 adalah 90,00% dalam Rencana Kerja 2026 dengan capaian kinerja program sebesar 1,06%.

4. Program Perumusan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan Rencana Kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan diakomodir dalam DPA dan DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Target Kinerja Program Perumusan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2026 adalah 90 % dengan capaian kinerja program tahun 2026 sebesar 0 %
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan rencana kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan, diakomodir dalam DPA dan DPPA Tahun 2026 sebanyak 1 (satu) kegiatan, yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Target capaian program ini adalah sebesar 85,00%, dengan capaian kinerja program ini sebesar 0%.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan rencana kegiatan sebanyak 3 kegiatan dan diakomodir dalam DPA dan DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 sebanyak 1 (satu) kegiatan, yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Target kinerja program pendidikan politik masyarakat dengan capaian kinerja program sebesar 90,00%, dan tingkat realisasi capaian kinerja program sebesar 10,96%.

Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja dan Program/Kegiatan

Berdasarkan data capaian kinerja program sebagaimana tersebut diatas, secara keseluruhan program program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota terlaksana dengan sangat baik. Maka terdapat 1 (satu) program yang target kinerjanya tidak tercapai. Kegiatan kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal serta memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Dari program-program tersebut hanya satu program yang dengan capaian relative lebih rendah dari capaian yang lain. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Capaian kinerja program ini sangat dipengaruhi oleh tidak terlaksananya secara maksimal rangkaian kegiatan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terkait dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2026 dimulai saat



pelaksanaan kampanye dan berakhirnya pemilihan Pemilu Kepala Daerah dan kegiatan Kepala Daerah dan Anggota Forkopimda lainnya yang cukup padat.

Faktor-Faktor Penyebab Terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan

Terdapat 5 program pada Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 yang terpenuhi target kinerjanya. Hal ini diantaranya disebabkan oleh seluruh usulan kegiatan dalam program program tersebut dapat diakomodir seluruhnya dalam DPA dan DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Kegiatan kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal serta memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Faktor-Faktor Penyebab Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Dari usulan program dan kegiatan dalam Renja Tahun Anggaran 2026, terdapat 3 Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja.

Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2025 – 2029.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 - 2029 disusun dengan mempedomani RPJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2029 untuk menunjang misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih. Oleh karena itu apabila capaian target program renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak tercapai maka akan menyebabkan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menunjang misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih tahun 2025 – 2029 akan terganggu.

Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil

Agar target perencanaan jangka menengah dalam Renja Tahunan dan DPA dapat tercapai dengan maksimal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang. Selain itu, perencanaan tersebut juga perlu memperhatikan saran dan masukan dari para pihak yang terkait, salah satunya melalui tahapan Forum Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan. Penganggaran program kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2025 – 2029 tetap dilanjutkan, dan ada sejumlah kebijakan strategis yang diambil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja Bidang kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya :

- a. Peringatan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya perlu dilakukan penekanan dimana tanpa perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, kita saat ini bukan siapa-siapa. Perlu pembagian peran dan pendanaan yang jelas dalam pelaksanaan peringatan Hari Bela Negara antara Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagari.
- b. Perubahan kewenangan pelaksanaan Paskibra dengan melibatkan TNI, Polri, Dinas Pendidikan dan para pihak lainnya perlu



dipersiapkan secara matang oleh Badan Kesbangpol sebagai salah satu langkah membentuk generasi penerus yang siap berkorban demi bangsa dan negara.

- c. Fasilitasi pemeliharaan kerukunan umat beragama secara berkesinambungan melibatkan Tim FKUB demi menjamin ketertiban dan ketentraman umum masyarakat khususnya terkait dengan meningkatnya permohonan izin mendirikan rumah ibadah yang berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat.
- d. Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dengan melibatkan BNN, Kepolisian dan para pihak lainnya perlu lebih diintensifkan dengan memperhatikan bahwa kejadian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah merambah di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berpotensi merusak generasi mendatang.
- e. Peningkatan Deteksi dan Kewaspadaan Dini dengan melibatkan TKDPD menghadapi berkembangnya paham dan aliran menyimpang, aliran radikal dan terorisme yang sudah masuk ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan berpotensi mengganggu proses dan hasil pembangunan.
- f. Fasilitasi Forkopimda dan Forkopimcam perlu lebih diperkuat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi persiapan Pemilu Serentak 2026 yang penuh tantangan.
- g. Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
- h. Pembentukan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Perkiraan Capaian Kinerja Program Tahun 2026

Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan sampai dengan kondisi sampai Tri Wulan II Tahun 2026, capaian program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja program 100 dan realisasi keuangan 45,90%, pada Tahun Anggaran 2026 diperkirakan capaian kinerja program sebesar 49,71%.
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, capaian kinerja program sebesar 91,05% dan realisasi keuangan 99,00%, pada Tahun Anggaran 2026 capaian kinerja program diperkirakan sebesar 98,97%,
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan capaian kinerja program sebesar 99,80% dan realisasi



keuangan 89,00%, Tahun Anggaran 2026 capaian kinerja program diperkirakan 99,92%.

- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, capaian kinerja program sebesar 99,54% dan realisasi keuangan 89,00%, pada Tahun Anggaran 2026 capaian kinerja program diperkirakan sebesar 0%.
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, capaian kinerja program sebesar 76,16% dan realisasi keuangan sebesar 89,00%, Tahun Anggaran 2026 capaian kinerja program diperkirakan sebesar 74,15%.
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan capaian kinerja program sebesar 55,75% dan realisasi keuangan sebesar 90,00%, Tahun Anggaran 2026 capaian kinerja program diperkirakan sebesar 87,70%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kewenangannya merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum ini merupakan kewenangan mutlak Presiden RI yang melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019. Lebih lanjut tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengalami penyesuaian dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan layanan kepada masyarakat antara lain:

1. pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
2. penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi;
3. pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
4. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;
5. fasilitasi organisasi kemasyarakatan;
6. pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah; dan
7. fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah.

Selanjutnya, dalam mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak menyebut secara spesifik bagaimana kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan umum diukur melalui pemilihan indikator yang relevan. Tidak adanya acuan ini menyebabkan pemilihan indikator kinerja layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya sebatas asosiasi dengan merujuk



kepada indikator yang digunakan pada lembaga/perangkat yang lebih tinggi, misalnya Badan Kesbangpol Propinsi atau Direktorat Jendral terkait di Kementrian Dalam Negeri. Akibat lebih lanjut, karena tidak adanya indikator kinerja yang disepakati bersama, pelaksanaan program kegiatan dan layanan pada Badan Kesbangpol menjadi kurang efektif dan efisien.

Untuk mengisi kekosongan peraturan dalam penetapan indikator kinerja layanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang dianggap sesuai. Meskipun dalam kenyataannya, beberapa indikator tersebut dipakai secara generik untuk semua perangkat daerah dan tidak merepresentasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara spesifik. Diantara indikator kinerja layanan Badan Kesbangpol yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) antara lain:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi;
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pencapaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Tahun 2026 secara rinci tertuang dalam Tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKU KD	IKD	IKU OPD	Target Renstra Perangkat Daerah / RPJMD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	64,17 (2024)	64,17 (2024)	58,75	58,75	64,17	69,58	75,00		53,33	58,75	64,17	64,17	69,58	Tercapai
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	67,02 (2024)	67,02 (2024)	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00		67,01	68,20	69,00	66,00	66,00	Tercapai
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89,97 (2024)	89,97 (2024)	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00		78,39	79,62	80,02	86,00	86,00	Tidak Tercapai
4.	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	-		-	62,80	62,80	62,80	62,80	62,80		62,80	62,80	62,80	62,80	62,80	Tercapai



Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2027

5.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	-		-	70% (2024)	-	70% (2024)	-	-		-	-	75,6 4%	-	-	Data Pemilu 2024
----	--	---	--	---	---------------	---	---------------	---	---	--	---	---	------------	---	---	------------------



Merujuk kepada Indikator Kinerja Daerah yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memilih beberapa Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang dapat mewakili kinerja layanan pada urusan pemerintahan umum. Capaian Indikator Kinerja Utama ini terbantu dengan hadirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana dalam peraturan tersebut, indikator kinerja setiap sub kegiatan telah dicantumkan dengan jelas. Sehingga capaian indikator kegiatan, program sub urusan maupun urusan dapat ditentukan secara linear dengan capaian pada pelaksanaan sub kegiatan.

Terkait dengan pelaksanaan program kegiatan yang mendukung capaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya pada indikator “Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial”, beberapa hal telah dilakukan pada tahun lalu (2026) sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Tanah Ulayat di Kenagarian Sungai Kamuyang,
- b. Terlaksananya mediasi terkait persoalan konflik sosial antar warga di Kenagarian Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki, sehingga tidak dampak lainnya yang timbul akibat persoalan tersebut.
- c. Pertemuan untuk mencari solusi terkait tuntutan dari masyarakat Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru kepada PTPN IV Wilayah IV.

Pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada indikator Persentase Fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memenuhi target karena adanya kerja sama yang baik dengan Tim PAKEM, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari, aparatur pemerintahan Kecamatan, Nagari dan Wali Jorong. Selanjutnya, IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nilai IKM tercapai karena adanya pelayanan penerbitan surat keterangan keberadaan (SKK) organisasi kemasyarakatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telah dilakukan pelayanan kepada masyarakat yang akan mengurus surat keterangan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dengan baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan mutlak Presiden RI yang melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019.

Diantara urusan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

1. pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
2. penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi;
3. pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
4. pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;



5. fasilitasi organisasi kemasyarakatan;
6. pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah; dan
7. fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut, ditetapkan beberapa indikator kinerja pelayanan. Indikator Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada indikator pelayanan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang mengacu pada RPJMN Tahun 2020–2024 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020). Diantara Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah:

- a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Indeks demokrasi Indonesia;
 - 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu; dan
 - 3) Indeks kinerja Ormas.
- b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi;
 - 2). Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM);
 - 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; dan
 - 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- c. Meningkatnya kewaspadaan nasional, dengan indikator sasaran strategis yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada setiap bidang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan pada bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan :
 1. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
 2. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
 3. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
 4. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
 5. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.
 6. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan Kebangsaan di daerah.
 7. Belum terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan.
 8. Belum terbentuknya Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. Permasalahan pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat :
 1. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih



- terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik.
2. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan.
 3. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan dini.
 4. Masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Tokoh Masyarakat maupun generasi muda di kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Permasalahan pada bidang politik dalam negeri :
1. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda
 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ormas dan LSM.
 3. Belum terhimpunnya seluruh data ormas, parpol dan LSM di Kabupaten Lima Puluh Kota
 4. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan parpol.
 5. Belum maksimal pelaksanaan monev terhadap keberadaan ormas, parpol dan LSM di Kab. Lima Puluh Kota.
 6. Kurangnya partisipasi Ormas/LSM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional (NPSK, SPM dan SDGs)

Pembangunan Nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai penjabaran dari visi, misi, program dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2020 - 2024 dan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025, disusunlah Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024.

RPJMN Tahun 2020 – 2024 menekankan pada jalan perubahan yaitu jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Proklamasi dan Pancasila menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan arah tujuan nasional pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- b. Memajukan kesejahteraan umum,
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kendati masih menghadapi permasalahan dan hambatan yang serius, khususnya dalam menangani persoalan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat sejumlah tantangan maupun peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota secara maksimal. Tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya gesekan antar anggota masyarakat maupun antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh sumber daya ekonomi (sengketa lahan, sumber daya alam) dan perbedaan persepsi keagamaan.
- b. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara.
- c. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.
- d. Tingginya jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di tengah masyarakat.
- e. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparat pemerintah.
- f. Belum optimalnya kinerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena belum lengkapnya peraturan yang mengatur masalah jabatan fungsional.

Sedangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem Pemerintahan Daerah, menyempurnakan paket Undang-Undang Politik dan Sistem Pemilukada serentak.
- b. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Adanya dukungan dana dari APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Adanya koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah seperti TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, BIN, BNN dan Kementerian Agama.
- e. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang Politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan.

2.3.4 Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026

Dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan tekad dan energi yang besar dan terencana. Keterlibatan seluruh stakeholder dalam penjaringan informasi dan koordinasi mutlak dilakukan. Dewasa ini kita lihat banyaknya pihak-pihak atau kelompok yang menginginkan adanya perpecahan dengan memicu berbagai konflik. Dalam kerangka pemikiran ini diperlukan analisis dalam merencanakan dan menjalankan strategi. Beberapa isu penting dalam rangka



perumusan program dan kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2026 bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdapat beberapa isu yang memerlukan perhatian dan fokus pemerintahan daerah :
 - a. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
 - b. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
 - c. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
 - d. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.
 - f. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan Kebangsaan .
 - g. Belum terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan.
 - h. Belum terbentuknya Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:
 - a. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik.
 - b. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan.
 - c. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan dini.
 - d. Masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Tokoh Masyarakat maupun generasi muda di kabupaten Lima Puluh Kota
3. Beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah pada bidang politik dalam negeri pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:
 - a. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda
 - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ormas dan LSM.
 - c. Belum terhimpunnya seluruh data ormas, parpol dan LSM di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - d. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan parpol.
 - e. Belum maksimal pelaksanaan monev terhadap keberadaan ormas, parpol dan LSM di Kab. Lima Puluh Kota.
 - f. Belum adanya partisipasi ormas/LSM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu dan pilukada.

Fokus penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dalam Rencana Kerja Tahun 2026, meliputi hal-hal sebagai



berikut :

- a. Memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara melalui fasilitasi penyelenggaraan pembinaan ideologi pancasila, bela negara, wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kehidupan demokrasi melalui peningkatan kebebasan, kesetaraan, kualitas kelembagaan demokrasi serta fasilitasi pendidikan politik masyarakat demi terjaganya situasi politik di daerah pasca pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.
- c. Meningkatkan kemandirian dan peran aktif organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat melalui Fasilitasi Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan Masyarakat.
- e. Meningkatkan Peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Perang Terhadap Narkoba melalui Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
- f. Meningkatkan stabilitas keamanan di daerah melalui deteksi dan pencegahan dini terhadap ancaman tantangan hambatan dan gangguan yang berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintah.

Dalam mendukung terciptanya stabilitas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan serta meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, beberapa hal perlu diperhatikan antara lain :

- Pemetaan daerah rawan konflik sosial,
- Mewaspada isu terorisme/radikalisme,
- Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat,
- Pengawasan terhadap orang asing.

Selain itu, menjadi sangat mendesak pembentukan dan pemberdayaan berbagai forum-forum lintas instansi yang mendukung fungsi dan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diantaranya :

- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA),
- Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (FKDPD),
- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),
- Forum Pembauran Kebangsaan (FKP)
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),
- Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM),
- Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota,
- Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- Tim Verifikasi/penelitian permohonan pencairan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota,
- Tim pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.4 Review terhadap RKPD



Salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dilakukannya reviu atau peninjauan kembali terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja tersebut adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi substansi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD). Hal ini patut di perhatikan mengingat pada hakikatnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Berdasarkan reviu terlihat bahwa beberapa program dan kegiatan mengalami penyesuaian baik secara indikator, target maupun besaran pendanaan. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka seluruh indikator kinerja pada Rencana Kerja Tahun 2027 mengalami penyesuaian.

Berdasarkan hasil reviu terdapat tambahan 1 (satu) sub kegiatan yang belum terakomodir dalam Rencana Strategis yaitu Pembentukan dan Penumbuhan Karakter karakter keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Penambahan satu sub kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pada Rancangan awal Rencana Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik direncanakan melaksanakan 6 (enam) program dengan pagu rencana sebesar Rp 6.149.010.000,00 Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis terjadi perubahan kerangka pendanaan terhadap rencana pelaksanaan program tersebut pada Rancangan Rencana Kerja menjadi Rp 4,500,000,000,00. Belum termasuk hibah bantuan keuangan kepada partai politik

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD secara lengkap disajikan dalam Tabel 2.3 berikut ini:



Tabel 2.3
Review Terhadap RKPD Tahun 2027
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.128.110.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3.613.967.000,00	
2 11 01 2.01	Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	97.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	25.373.300	
2 11 01 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbang pol	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	6 Doku men	21.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbang pol	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	9 Doku men	30.000.000,00	
2 11 01 2.01 002	Koordinasi dan	Badan Kesbang	Jumlah Dokumen RKA	1	10.000.000,00	Koordinasi dan	Badan Kesbang	Jumlah Dokumen RKA	1	-	



Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2027

Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	pol	yang disusun			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	ol	yang disusun			
2 11 01 2.01 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbang pol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	1	10.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbang pol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	1	-	
2 11 01 2.01 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Kesbang pol	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1	10.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Kesbang pol	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1	-	
2 11 01 2.01 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbang pol	Jumlah Dokumen DPPA yang disusun	1	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbang pol	Jumlah Dokumen DPPA yang disusun	1	-	
2 11 01 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Badan Kesbang pol	Jumlah LKJiP, LKPJ, LPPD, SPIP yang disusun	4	10.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Badan Kesbang pol	Jumlah LKJiP, LKPJ, LPPD, SPIP yang disusun	20 Laporan	20.000.000,00	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
2 11 01 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbang pol	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	16 Lapora n	26.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	4	-	
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3.194.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3.314.967.000,00	
2 11 01 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbang pol	Jumlah orang bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	33 Orang/ bulan	3.150.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah orang bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	33 Orang/ bulan	3.294.967.000,00	
2 11 01 2.02 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi	Badan Kesbang pol	Jumlah dokumen penataausahaan yang tersusun	12	11.000.000,-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen penataausahaan yang tersusun	18	-	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Keuangan SKPD					Keuangan SKPD					
2 11 01 2.02 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesbang pol	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun Badan Kesbangpol	1	11.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun Badan Kesbangpol	1	0	
2 11 01 2.02 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Badan Kesbang pol	Jumlah Dokumen laporan SPJ Fungsional dan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik	12 Laporan	11.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen laporan SPJ Fungsional dan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik	12 Laporan	20.000.000,00	
2 11 01 2.02 008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Badan Kesbang pol	Jumlah Dokumen laporan pronogsis realisasi anggaran	1	11.000.000,-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen laporan pronogsis realisasi anggaran	1	-	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	18.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	0	
2 11 01 2.03 006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan Kesbang pol	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	9.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	0	
2 11 01 2.03 007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Kesbang pol	Jumlah Dokumen Laporan Asset	12	9.000.000,00						
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	16.000.000,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	-	
2.11.01.2.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Badan Kesbang pol	jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	40	16.000.000,-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Badan Kesbangpol	jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	40	-	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kelengkapan nya					Kelengkapan nya					
2.11.01.2.05 009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Badan kebangp ol	Jumlah kali mengikuti diklat		-	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Badan kebangpol	Jumlah kali mengikuti diklat	3	-	
2.11.01.2.05 010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Badan Kesbang pol	Jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan		-	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Badan Kesbangpo l	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	1	-	
2.11.01.2.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Badan Kesbang pol	Jumlah kali mengikuti Bimtek		-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Badan Kesbangpo l	Jumlah kali mengikuti Bimtek	2	-	
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang	100	231.000.0 00	Administrasi Umum Perangkat	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang	100	128.000.000, 00	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah		Urusan Pemerintah Daerah			Daerah		Urusan Pemerintah Daerah			
2 11 01 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbang pol	Jumlah paket alat listrik yang diadakan	1	11.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket alat listrik yang diadakan	1 Paket	2.000.000,00	
2 11 01 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbang pol	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	2	26.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	2	0	
2 11 01 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Kesbang pol	Jumlah paket ATK yang diadakan jumlah jenis alat kebersihan yang diadakan	2	36.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket ATK yang diadakan jumlah jenis alat kebersihan yang diadakan	3 Paket	15.000.000,00	
2 11 01 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan	Badan Kesbang pol	Jumlah Jenis Barang yang dicetak	2	14.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan	Badan Kesbangpol	Jumlah Jenis Barang yang dicetak	2 Paket	8.000.000,00	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penggandaan		Jumlah Lembar Pengadaan			Penggandaan		Jumlah Lembar Pengadaan			
2 11 01 2.06 007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Kesbang pol	Pembelian Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (porsi)	12	8.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Kesbangpol	Pembelian Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (porsi)	8 Laporan	3.000.000,00	
2 11 01 2.06 008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbang pol	Jumlah orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	136.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	80.000.000,00	
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	160.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	0	
2 11 01 2.07 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Badan Kesbang pol	Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang diadakan	2	80.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Badan Kesbangpol	Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang diadakan	2	0	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	atau Lapangan					atau Lapangan					
2 11 01 2.07 005	Pengadaan Mebel	Badan Kesbang pol	Jumlah unit pengadaan mebel	6	50.000.000	Pengadaan Mebel	Badan Kesbang pol	Jumlah kursi tunggu dan kursi tamu yang diadakan	2	0	
2 11 01 2.07 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbang pol	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbang pol	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6	10.000.000,00	
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	196.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	21.000.000,00	
2 11 01 2.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbang pol	Jumlah Buku Cek yang disediakan, Jumlah Lembar Materai yang disediakan	12	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbang pol	Jumlah Buku Cek yang disediakan, Jumlah Lembar Materai yang disediakan	1 Laporan	1.000.000,00	
2 11 01 2.08	Penyediaan	Badan	Jumlah Kali	12		Penyediaan	Badan	Jumlah Kali	12	20.000.000,0	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
002	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kesbang pol	Pembayaran Rekening Telfon, Listrik, Air, Surat Kabar dan TV berlangganan		15.000.000	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kesbang pol	Pembayaran Rekening Telfon, Listrik, Air, Surat Kabar dan TV berlangganan	Laporan	0	
2 11 01 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbang pol	Jumlah bulan pembayaran honor Tenaga Kontrak Khusus dan Tenaga Kontrak Biasa	12	180.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbang pol	Jumlah bulan pembayaran honor Tenaga Kontrak Khusus dan Tenaga Kontrak Biasa	12	0	
2 11 01 2.09	Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	216.110.000	Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbang pol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100.000.000,00	
2 11 01 2.09 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Badan Kesbang pol	Jumlah Kali unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1	42.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Badan Kesbang pol	Jumlah Kali unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	12 Unit	100.000.000,00	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)			
2 11 01 2.09 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Badan Kesbang pol	Jumlah Kali unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	13	136.950.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Badan Kesbang pol	Jumlah Kali unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	13	136.950.000,00	
2 11 01 2.09 006	Pemeliharaaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbang pol	Jumlah kali unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33	6.210.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbang pol	Jumlah kali unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32	10.000.000,00	
2 11 01 2.09	Pemeliharaaa	Badan	Jumlah Paket	1		Pemeliharaan	Badan	Jumlah Paket	1	0	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
009	n/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbang pol	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor		30.000.000	/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbang pol	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor			
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%	837.550.000,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90	480.000.000,00.	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%	837.550.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90	480.000.000,00	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8 01 02 2.01 001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen program kerja yang disusun			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	-	1	-	
8 01 02 2.01 002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Kab. Lima Puluh Kota	-	1	-	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					
8 01 02 2.01 003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bimtek, sosialisasi, FPK, GNRM	150	25.640.124,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideology dan wawasan kebangsaaan (orang)	200 Orang	20.000.000,00	
8 01 02 2.01 004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi	Kab. Lima Puluh Kota	Peringatan bela negara (lokasi)	650	183.234.100,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi d	650 Orang	100.000.000,00	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		bidang ideology dan wawasan kebangsaan (orang)			
8 01 02 2.01 005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	Kab. Lima Puluh Kota	Sosialisasi peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideology dan wawasan kebangsaan	35	-	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Sejarah Kebangsaan					dan Sejarah Kebangsaan					
8 01 02 2.01 006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter	120	32.183.176,00	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter	100 Keluarga	20.000.000,00	
8 01 02 2.01	Pembinaan	Kab.	Jumlah	54	10.420.00				28	40.000.000,0	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
007	Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Lima Puluh Kota	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		0,00				Dokumen	0	
8 01 02 2.01 008	Pembentukan Paskibraka	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah anggota paskibraka	54	586.072.600,00	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan purnapaskibra	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah anggota paskibraka	28 Orang	300.000.000,00	
8 01 02 2.01 009	Pelaksanaan Tugas Purnapaski Duta Pancasila	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Tugas Purnapaskibra ka Duta Pancasila			Pelaksanaan Tugas Purnapaski Duta Pancasila	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Tugas Purnapaskibra ka Duta Pancasila		0	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	91%	169.130.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	85	164.140.000,00	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	90%	169.130.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	85	164.140.000,00	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintah an, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					Pemerintaha n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
8 01 03 2.02 001	Penyusunan Progam Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintaha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun		-	Penyusunan Progam Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintaha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun	2	-	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemil ihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8 01 03 2.02 002	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun		-	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun	3	-	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah										
8 01 03 2.02 003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	390	63.090.400,00	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan politik	100 Orang	20.000.000,00	Berisi pendanaan untuk hibah penyelenggaraan Pemilu 2024



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemil ihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					
8 01 03 2.02 004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintaha n,	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sosialisasi banpol dan verifikasi banpol	200 Orang	64.090.400, 00	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintaha n, Perwakilan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di biadang pendidikan politik	100 Orang	64.140.000,0 0	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
8 01 03 2.02 005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bulan dilakukan monitoring Jumlah Kecamatan dilakukan Monitoring	13	9.300.000 ,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik	12	0	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemil ihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
8 01 03 2.02 006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Kegiat an	32.649.200, 00	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Kegiat an	80.000.000,0 0	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDA YAAN DAN PENGAWAS AN ORGANISAS I	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemberdayaa n dan Pengawasan Ormas	90%	14.220.00 0	PROGRAM PEMBERDA YAAN DAN PENGAWASA N ORGANISASI KEMASYAR	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemberdayaa n dan Pengawasan Ormas	90	25.893.000 ,00	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KEMASYARAKATAN					AKATAN					
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemberdayaa n dan Pengawasan Ormas	55	14.220.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemberdayaa n dan Pengawasan Ormas	90	25.893.000,00	
8 01 04 2.01 001	Penyusunan Progam Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen program kerja yang disusun	1 Dokumen	25.893.000,00	Penyusunan Progam Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen program kerja yang disusun	1 Dokumen	25.893.000,00	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
8 01 04 2.01 002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun	1	-	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun	1	-	
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah ormas yang terdaftar, dibina dan diawasi	55	14.220.000,00	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di	35	207.963.000	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		bidang pemnberdayaa n ormas			
8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	-	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	-	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat	85%	350.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat	85	68.500.000,00	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat	85%	350.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat	85	68.500.000,00	
8 01 05 2.01 001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen program kerja yang disusun	1	-	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen program kerja yang disusun	1	-	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalaguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalaguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
8 01 05 2.01 002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun	2	-	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun	2	-	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyalaguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Penyalaguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalaguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah rapat Pakem, FKUB dan penyuluhan Narkotika/P4 GN	10	150.000.0 00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalaguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah rapat Pakem, FKUB dan penyuluhan Narkotika/P4 GN	60 Orang	24.775.000,0 0	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Penghayat Kepercayaan di Daerah					
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10	150.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi	75 Orang	43.725.000,00	
8 01 05 2.01 005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan	Kab. Lima Puluh	Jumlah monitoring yang	13	30.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah monitoring yang	12	-	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota	dilakukan			Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		dilakukan			
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKAT	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	90%	650.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKAT	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	85	147.500.000,00	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	AN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANA N KONFLIK SOSIAL					AN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANA N KONFLIK SOSIAL					
8 01 01 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaa n Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	90%	650.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaa n Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	85	147.500.000,00	
8 01 06 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerjasama	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen program kerja yang di susun	1	-	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerjasama	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen program kerja yang di susun	1	-	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
8 01 06 2.01 002	Penyusunan bahan Perumusan Program kerja di Bidang Kewaspadaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun	2	-	Penyusunan bahan Perumusan Program kerja di Bidang Kewaspadaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK yang disusun	2	-	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	n Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah					n Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah					
8 01 06 2.01 003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaa n Dini,	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rapat TDPD FKDM dan Penangan Konflik sosial	12	150.000.0 00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaa n Dini,	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang melaksanakan kebijakan di bidang	50 Orang	30.000.000,0 0	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		kewaspadaan dini			
8 01 06 2.01 004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	200.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	60 Orang	80.500.000,00	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah					Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah					
8 01 06 2.01 005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilakukan	12	-	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilakukan	12	-	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	n Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah					n Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah					
8 01 06 2.01 006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah	12	300.000.00 0,00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi	4 Doku men	37.000.000,0 0	



Kode	RKPD (1-6 Renstra)					Hasil Analisis Kebutuhan (7-11 SIPD, rancangan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/ Kota					Kabupaten/K ota		pimpinan daerah			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.149.010.000,00					4.500.000.000,00		



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat (*bottom-up*). Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Aspirasi masyarakat ini melengkapi pelaksanaan program kegiatan oleh perangkat daerah berdasarkan kebijakan yang lebih tinggi (*top-down*).

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan langsung kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota dapat berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dunia usaha dan para pihak lainnya. Usulan program kegiatan juga dapat berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kabupaten/kota.

Sebagai perangkat daerah pengampu kewenangan dalam urusan pemerintahan umum dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Lebih dari itu, usulan program dan kegiatan juga dapat berasal dari aspirasi masyarakat yang tersalur melalui reses anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota (Pokok Pikiran). Dalam pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 maupun Forum Perangkat Daerah serta Pokok Pikiran melalui reses Anggota Dewan, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	NIHIL				
2.					
3.					

Keterangan: Usulan program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sasaran utama pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Pembangunan sumber daya manusia.
2. Pembangunan infrastruktur.
3. Penyederhanaan regulasi.
4. Penyederhanaan Birokrasi.
5. Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-environment*. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Prioritas 1 dan 3 yaitu :

- Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- Penyederhanaan dan Reformasi Birokrasi.

3.1.2. Telaahan Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.



Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2027

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Digital.
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut. Rencana pembangunan pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sejalan dengan prioritas pembangunan nomor 7 (tujuh), yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas.

3.1.3. Telaahan Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 memuat Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu *“Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan”*. Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan beberapa Misi dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya, dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
- b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
- c. Mendorong potensi Nagari sebagai poros pembangunan Daerah.
- d. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Untuk mewujudkan misi tersebut selanjutnya dituangkan kedalam 10 (sepuluh) agenda prioritas pembangunan antara lain:

1. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak.
2. Peningkatan peran limbago adat.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas akses jalan daerah, antar daerah dan propinsi.
4. Pembangunan kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh.
5. Peningkatan mutu pendidikan.



Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2027

6. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat.
7. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis.
8. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan.
9. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
10. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan umum, berdasarkan uraian diatas berperan mendukung Misi ke-4 Kepala Daerah terpilih yang lebih lanjut dijabarkan pada agenda prioritas pembangunan nomor 10 (sepuluh). Misi dan agenda prioritas tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota

Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027, selaras dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah antara lain:

1. Menguatnya kesadaran berbangsa dan bernegara melalui fasilitasi penyelenggaraan pembinaan ideologi pancasila, bela negara, wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui peningkatan kebebasan, kesetaraan, kualitas kelembagaan demokrasi serta fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat.
3. Meningkatnya kemandirian dan peran aktif organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
5. Meningkatnya Fasilitasi Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan demi terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.
6. Terjaganya stabilitas keamanan di daerah melalui deteksi dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Untuk lebih jelas tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025 - 2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan pilukada	65,30	65,30	65,30	65,30	80,00	80,00	UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
		Menurunnya	Persentase	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	UU No 7



		tingkat konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	penyelesaian konflik sosial yang ditangani							Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan karakter berbangsa dan bernegara	Persentase Pembinaan Karakter untuk Paskibraka	50	55	60	65	70	75	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;



3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 mengacu kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029. Rencana Strategis tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. Lebih dari itu Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga disusun selaras dengan RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.

Selanjutnya penentuan program dan kegiatan dalam rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga wajib mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027, yang telah ditetapkan Kepala Daerah melalui Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022. Adapun Pencantuman nomenklatur program dan kegiatan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan mutlak Presiden RI yang melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019. Selanjutnya di level daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah diatur melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2021 yang mengatur tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Diantara urusan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain: 1) pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan; 2) penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi; 3) pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang; 4) pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya; 5) fasilitasi organisasi kemasyarakatan; 6) pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah; dan 7) fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah.

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan untuk penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota untuk urusan/unsur Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat satu isu prioritas. Isu tersebut adalah masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Lima Puluh Kota (63%) dibandingkan partisipasi tingkat Propinsi (75,64%) maupun nasional (85,90%). Permasalahan selanjutnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam fasilitasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.



Lebih dari itu terdapat permasalahan juga terkait dengan masih terbatasnya peran aktif organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan masih rendahnya Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Keseluruhan hasil identifikasi permasalahan tersebut tertuang dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Lima Puluh Kota
Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada	Belum tercapai (<)	Tingkat partisipasi pemilih lebih rendah daripada tingkat partisipasi di Propinsi maupun Nasional	Peran aktif para pihak dalam mensukseskan Pemilu Kada melalui Pendidikan politik
	Belum Optimalnya peran aktif organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Rendah	Potensi ormas untuk berperan dalam pembangunan daerah belum tergali secara maksimal	Sumber daya terbatas; keuangan belum mandiri; program kerja tidak jelas; maanfaat ormas bagi daerah belum dirasakan
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam P4GN	Rendah	Meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berpotensi merusak generasi kedepan	Peningkatan fasilitasi pemberantasan narkoba; intensifikasi kontrol sosial masyarakat; pembentukan Nagari Bersih Narkoba

Sesuai dengan kewenangan yang diemban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam urusan pemerintahan umum dijabarkan menjadi beberapa program dan kegiatan. Dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan melaksanakan 6 (enam) Program Urusan Pemerintahan Umum sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pematapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Secara lebih terperinci, penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan umum dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum

No	Program /Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)
I	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	
	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan

No	Program /Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)
		Sejarah Kebangsaan. - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. - Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka - Pembentukan Paskibraka
II	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
III	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	- Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah



No	Program /Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)
IV	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya.	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
V	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya, terdapat 1 (satu) program yang merupakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang mencakup 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Pengadaan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Secara lebih terperinci, penjabaran program kegiatan dan sub kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah disampaikan dalam Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. - Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor. - Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor. - Penyediaan bahan logistik kantor. - Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan - Fasilitasi Kunjungan tamu. - Penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD.
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
	5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Penyediaan jasa surat menyurat. - Penyediaan jasa dan komunikasi Sumber Daya air dan listrik.
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjag Urusan Pemerintah Daerah	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
JML	6 Kegiatan	15 Sub Kegiatan

Berdasarkan pengelompokan program dan kegiatan tersebut maka pada Tahun Anggaran 2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota pada urusan pemerintahan umum direncanakan melaksanakan 5 (lima) program 5 (lima) kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, dilaksanakan satu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 6 (enam) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub kegiatan. Rekapitulasi progam kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5

Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesbangpol Tahun 2027

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	6	15
2	Urusan Pemerintahanan Umum	5	5	13
Jumlah		6	11	28

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 berdasarkan uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan target kinerja serta perkiraan maju rencana Tahun Anggaran 2028. Berdasarkan program dan kegiatan, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2027 terdiri atas sebanyak 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Jumlah yang sama juga dijumpai pada perkiraan maju rencana Tahun 2028. Secara lebih lengkap, rencana kerja Perangkat Daerah badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut program dan kegiatan ditampilkan dalam Tabel 4.1 berikut ini:



Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
															NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		100	6.818.212.802	1.661.172.734,-		4.500.000.000,00							6.256.500.000,00		
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			6.818.212.802	1.661.172.734,-		4.500.000.000,00							6.256.500.000,00		
	8.01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		100	6.818.212.802	1.661.172.734,-		4.500.000.000,00							6.256.500.000,00		
1.	8.01.01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	1.507.721.378,00		3.613.967.000,00							3.986.500.000,00		
							Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100		1.507.721.378,00	100 Persentase	3.473.967.000,00						-	3.836.500.000,00		
							-			-	-	0,00						-	20.000.000,00		
	8.01.01.2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	28.669.000,00	8.635.00,00		50.000.000,00					-		80.000.000,00		
						-						50.000.000,00					-		80.000.000,00		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	28.669.000,00	8.635.00,00	-	30.000.000,00						-	40.000.000,00		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3		-	-	20.000.000,00						-	40.000.000,00		

							Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
	8.01.01.2.01.0001					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25	28,699,000,00	8.635.00,00		30.000.000,00			-	-	-			40.000.000,00	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	25	28.669.000,00	8.635.00,00	9 Dokum en	30.000.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K
	8.01.01.2.01.0006					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3				20.000.000,00			-	-	-			40.000.000,00	
						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3		-	20 Lapora n	20.000.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K
	8.01.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	2.800.600.362,00	1.434.316.717,00		3.314.967.000,00						-		3.430.000.000,00	
						-			2.800.600.362,00	1.434.316.717,00		3.314.967.000,00						-		3.430.000.000,00	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	48		-	-	20.000.000,00							-	30.000.000,00	



								wulanan/Se mesteran SKPD													
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165			-	3.294.967.000,00						-	3.400.000.000,00	
		8.01.01.2.02. 0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		165	2.800.600.362,00	1.434.316.717,00		3.294.967.000,00			-	-	-		3.400.000.000,00	
							Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165	2.800.600.362,00	1.434.316.717,00	33 Orang/ bulan	3.294.967.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	3.400.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K
		8.01.01.2.02. 0007					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		48				20.000.000,00			-	-	-		30.000.000,00	
							Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	48		-	12 Lapora n	20.000.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	30.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K
		8.01.01 .2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	154.679.329,00	30.247.351,00		128.000.000,00					-		225.000.000,00	
							-			154.679.329,00	30.247.351,00		128.000.000,00					-		225.000.000,00	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	2.010.000,00	6.06.000,00	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
								Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78	95.957.229,00	22.534.605,00	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
								Jumlah Paket Bahan	20	27.769.500,00	4.463.756,00	-	15.000.000,00						-	40.000.000,00	



Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2027

							Logistik Kantor yang Disediakan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	6.852.600,00	2.300.000,00	-	8.000.000,00							-	20.000.000,00	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	6.090.000,00	342.990,00	-	2.000.000,00							-	10.000.000,00	
	8.01.01.2.06.0001						Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor		16	6.090.000,00	342.990,00		2.000.000,00			-	-	-		10.000.000,00	
							Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	6.090.000,00	342.990,00	1 Paket	2.000.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004						Penyediaan Bahan Logistik Kantor		20	27.769.500,00	4.463.756,00		15.000.000,00			-	-	-		40.000.000,00	
							Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	27.769.500,00	4.463.756,00	3 Paket	15.000.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		20	6.852.600,00	2.300.000,00		8.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	
							Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	6.852.600,00	2.300.000,00	2 Paket	8.000.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008						Fasilitasi Kunjungan Tamu		60	2.010.000,00	6.06.000,00		3.000.000,00			-	-	-		5.000.000,00	
							Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	60	2.010.000,00	6.06.000,00	8 Laporan	3.000.000,00	Kab . Lim a	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	5.000.000,00	BADAN KESATUAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2027

							Tamu						Pul uh Kot a							BANGS A DAN POLITI K		
	8.01.01.2.06. 0009						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		78	95.957.229,00	22.534.605,00		100.000.000,00			-	-	-		150.000.000,00		
							Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78	95.957.229,00	22.534.605,00	12 Lapora n	100.000.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	150.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K	
	8.01.01 .2.07						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	26.700.000,00			0,00						-	20.000.000,00		
							-			26.700.000,00			0,00						-	20.000.000,00		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	19.500.000,00	-	-	0,00							-	20.000.000,00	
	8.01.01.2.07. 0006						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14	19.500.000,00			0,00			-	-	Meningkat an tata kelola pemerintah an yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRI TAS"		20.000.000,00		
							Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	19.500.000,00	-	2 Unit	0,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	20.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K	
	8.01.01.2.07. 000						Pengadaan Mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	16	7.200.000,00												
	8.01.01 .2.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	120.534.820,00	5.669.118,00		21.000.000,00						-	31.500.000,00		
							-			120.534.820,00	5.669.118,00		21.000.000,00						-	31.500.000,00		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	11.784.820,00	5.669.118,00	-	20.000.000,00							-	30.000.000,00	



							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	750.000,00	-	-	1.000.000,00						-	1.500.000,00		
	8.01.01.2.08.0001						Penyediaan Jasa Surat Menyurat		60	750.000,00		1.000.000,00			-	-	-		1.500.000,00		
							Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	750.000,00	-	1.000.000,00	Kab . Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0002						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		60	11.784.820,00	5.669.118,00	20.000.000,00			-	-	-		30.000.000,00		
							Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	11.784.820,00	5.669.118,00	20.000.000,00	Kab . Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0002						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		54	108.000.000,00											
							Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54	108.000.000,00											
	8.01.01.2.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	121,364.675,00	28.853.192,00	100.000.000,00						-	200.000.000,00		
							-			121,364.675,00	28.853.192,00	100.000.000,00						-	200.000.000,00		
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-16	114,386.675,00	28.853.192,00	-	100.000.000,00						-	180.000.000,00	
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	136	6.978.000,00	-	-	0,00						-	20.000.000,00	



Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2027

	8.01.01.2.09.0001						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		16	114,386.675,00	28.853.192,00		100.000.000,00			-	-	-		180.000.000,00		
							Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	114,386.675,00	28.853.192,00	12 Unit	100.000.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	180.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K	
	8.01.01.2.09.0006						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		136	6.978.000,00			0,00			-	-	Meningkatk an tata kelola pemerintaha n yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		20.000.000,00		
							Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	136	6.978.000,00	-	28 Unit	0,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	20.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K	
2.	8 . 0 1 . 0 2						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		90	802.882.417,00	128.567.356,00		480.000.000,00							1.190.000.000,00		
								Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90	802.882.417,00	128.567.356,00	90 Persen tase	460.000.000,00							-	1.090.000.000,00	
	8.01.02 .2.01						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		90	802.882.417,00	128.567.356,00		480.000.000,00						ASN dan Penyelenggara Negara, Generasi Muda dan Dunia Pendidikan, Komponen Masyarakat	1.190.000.000,00		
							-						480.000.000,00						ASN dan Penyelenggara Negara, Generasi Muda dan Dunia	1.190.000.000,00		



																Pendidikan, Komponen Masyarakat				
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentuka n dan Penumbuha n Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayata n dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarak at, Berbangsa, dan Bernegara	480			-	20.000.000,00						-	40.000.000,00	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2950	174.099,196	68.518.200,00	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,	600		564.600,00	-	20.000.000,00						-	100.000.000,00	



								Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
								Jumlah Paskibraka	244	628.783.221	59.484.556	-	300.000.000,00					-	800.000.000,00	
								Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	216		59.484.556	-	40.000.000,00					-	100.000.000,00	
	8.01.02.2.01.0003						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		600		564.600,00		20.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-	100.000.000,00	
							Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600		564.600,00	200 Orang	20.000.000,00	Kab . Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)			-	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		2950	174.099,196	68.518.200,00		100.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-	150.000.000,00	



						Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2950	174.099,196	68.518.200,00	650 Orang	100.000.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K
	8.01.02.2.01.0006					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		480				20.000.000,00			1.Memperkoko h ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-			40.000.000,00	
						Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentuka n dan Penumbuha n Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayata n dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarak at, Berbangsa, dan Bernegara	480		-	100 Keluar ga	20.000.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K
	8.01.02.2.01.0007					Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		216				40.000.000,00			1.Memperkoko h ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi	-	-			100.000.000,00	



Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2027

													manusia (HAM).								
						Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	216		-	28 Dokumen	40.000.000,00	Kab . Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0008					Pembentukan Paskibraka		244	628.783.221,00	59.484.556		300.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-		800.000.000,00		
						Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	244		59.484.556	28 Orang	300.000.000,00	Kab . Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3.	8	0	1	0	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		92	2.635.282.199,00	12.009.000,00		164.140.000,00							350.000.000,00		
							Persentase Pendidikan Politik pada Kader Politik	92	2.635.282.199,00	12.009.000,00	90 Persentase	164.140.000,00						-	350.000.000,00		
	8.01.03.2.01					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		92	2.635.282.199,00	12.009.000,00		164.140.000,00					Partai Politik, Masyarakat dan Generasi Muda, ASN dan Penyelenggara Negara		350.000.000,00		
						-			2.635.282.199,00	12.009.000,00		164.140.000,00						Partai Politik, Masyarakat dan Generasi Muda, ASN dan Penyelenggara Negara		350.000.000,00	



						Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	216			-	80.000.000,00						-	200.000.000,00	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	850	1.025.662.191,00	2.625.000,00	-	64.140.000,00						-	100.000.000,00	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	1660	1.609.620.008,00	9.384.000,00	-	20.000.000,00						-	50.000.000,00	



						Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
	8.01.03.2.01.0003					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1660	1.609.620.008,00	9.384.000,00		20.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-			50.000.000,00	
						Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintahaha n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1660	1.609.620.008,00	9.384.000,00	100 Orang	20.000.000,00	Kab . Lima Pul uh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K
	8.01.03.2.01.0004					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala		850	1.025.662.191,00	2.625.000,00		64.140.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	-	-			100.000.000,00	



Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2027

					Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.						
					Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	850	1.025.662.191,00	2.625.000,00	100 Orang	64.140.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	100.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K
	8.01.03.2.01.0006				Pelaksanaan tugas Paskibraka		216				80.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		200.000.000,00	
					Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	216		-	1 Kegiat an	80.000.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	200.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K



4.	8					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		90				25.893.000,00							30.000.000,00	
							Persentase Organisasi Kemasyarak atan yang aktif	90		-	90 Persen tase	25.893.000,00						-	30.000.000,00	
	8.01.04					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		90				25.893.000,00					Organisasi Masyarakat yang bersekretariat di Kabupaten Lima Puluh Kota		30.000.000,00	
	.2.01					-						25.893.000,00					Organisasi Masyarakat yang bersekretariat di Kabupaten Lima Puluh Kota		30.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	225		-	-	25.893.000,00						-	30.000.000,00	
	8.01.04.2.01.					Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		0				25.893.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		30.000.000,00	
	0001																			



						Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0		-	1 Dokumen	25.893.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K
5.	8 . 0 1 . 0 5					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		85	19.050.000,00			68.500.000,00								150.000.000,00	
							Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgun aan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	85	19.050.000,00	-	85 Persen tase	68.500.000,00							-	150.000.000,00	
	8.01.05 .2.01					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		85	19.050.000,00			68.500.000,00						Masyarakat		150.000.000,00	
						-						68.500.000,00						Masyarakat		150.000.000,00	



						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40		-	-	43.725.000,00						-	100.000.000,00	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	104	19.050.000,-	-	-	24.775.000,00						-	50.000.000,00	
	8.01.05.2.01.0003				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		104	19.050.000,-			24.775.000,00		8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	-	-			50.000.000,00	



													mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
					Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	104	19.050.000,-	-	60 Orang	24.775.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K
	8.01.05.2.01.0004				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		40				43.725.000,00			8.Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-			100.000.000,00	
					Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	40		-	75 Orang	43.725.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K



Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2027

							Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
6.	8	0	1	0	6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		90	108.450.000,00	12.875.000,00		147.500.000,00						550.000.000,00
							Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	90	108.450.000,00	12.875.000,00	90 Persentase	147.500.000,00					-	550.000.000,00	
	8.01.06	.2.01					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	90	108.450.000,00	12.875.000,00		147.500.000,00					Masyarakat	550.000.000,00	
							-		108.450.000,00	12.875.000,00		147.500.000,00					Masyarakat	550.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	60	49.825.000,00	-	-	37.000.000,00					-	350.000.000,00	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	348		12.875.000,00	-	80.500.000,00					-	150.000.000,00	



							Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah	48	58.625.000,00	-	-	30.000.000,00					-	50.000.000,00			
	8.01.06.2.01.0003					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		48	58.625.000,00			30.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-			50.000.000,00	



						Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	48	58.625.000,00	-	50 Orang	30.000.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K
	8.01.06.2.01.0004					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		348		12.875.000,00		80.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-			150.000.000,00	
						Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	348		12.875.000,00	60 Orang	80.500.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K



Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2027

							n Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah														
	8.01.06.2.01.0006					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		60	49.825.00,00			37.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-			350.000.000,00	
						Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	60	49.825.00,00	-	4 Dokumen	37.000.000,00	Kab . Lim a Pul uh Kot a	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	350.000.000,00	BADA N KESAT UAN BANGS A DAN POLITI K
	J U M L A H								6.818.212.802,00	1.661.172.734,00		4.500.000.000,00								6.256.500.000,00	



Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 berjumlah total Rp 4.500.000.000,- (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*). Pendanaan tersebut terdiri atas Rp, 886.033.000,00 - (*Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan Rp, 3.613.967.000,00 - (*Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) untuk program penunjang urusan pemerintah daerah. Adapun dana indikatif pada prakiraan maju (2028) adalah sebesar Rp 6.256.500.000,00,- (*Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). Pelaksanaan unsur pemerintahan umum meliputi 5 (lima) program dan 5 (lima) kegiatan. Selanjutnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan. Secara lebih lengkap rekapitulasi rencana kebutuhan pendanaan menurut program dan kegiatan pada rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:



Tabel 4.2

Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027

No	Bidang Urusan	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2027		Tahun 2028	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumla h	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Juml ah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Unsur Pemerintahan Umum	5	886.033.000,00	2.270.000.000,00	5	886.033.000,00	2.270.000.000,00	
2.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	3.753.011.982,00	3.986.500.000,00	6	3.753.011.982,00	3.986.500.000,00	



BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 terdapat Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 dapat kita lihat pada Table 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target / Realisasi Tahun							Ket
			2025 Target	2025 Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Nilai Sakip Badan kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	70	75,01	71	72	73	74	75	
2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan pemilukada	%	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	80,00	80,00	
3.	Persentase penyelesaian konflik sosial yang ditangani	%	92,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	
4.	Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	50	50	55	60	65	70	75	

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu:

1. Nilai Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 dengan target 72 %. Target nilai Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 yaitu 70 % dengan realisasi yaitu 75,01 %. Nilai sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan nilai yang telah direview oleh Inspektorat terhadap hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. komponen yang dinilai meliputi:
 - a. Perencanaan kinerja
 - b. Pengukuran kinerja
 - c. Pelaporan kinerja
 - d. Evaluasi internal

- 2. Tingkat partisipasi masyarkat dalam pemilu dan pemilukada target tahun 2025 yaitu 65,30 dengan realisasi 65,30. Hasil penghitungan ini berdasarkan data pemilu dan pemilukada tahun 2024 karena pemilu dan pemilukada dilaksanakan sekali 5 (lima) tahun.
- 3. Persentase penyelesaian konflik sosial yang ditangani target tahun 2027 yaitu 94,00 %. Persentase penyelesaian konflik sosial yang ditangani target tahun 2025 yaitu 90 % dengan realisasi 87 %. Realisasi fisik tidak dapat dicapai sesuai target, karena ada beberapa konflik sosial tersebut tidak bisa diselesainya ditingkat bawah, karena berlanjut ke pihak yang berwenang melalui APH.
- 4. Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan target tahun 2027 yaitu 60 %. Persentase penguatan indiologi pancasila dan karakter kebangsaan target tahun 2025 yaitu 50 % dengan realisasi yaitu 50 %. Penguatan idiologi pancasila dan karakter kebangsaan ini dalam bentuk pelaksanaan peringatan peristiwa bersejarah (bela negara) dan wawasan kebangsaan serta paskibra.

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2027 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat kita lihat pada tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci

Urusan : Pemerintahan Umum

No	Indikator	Satuan	Target/Realisasi Tahun						
			2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cakupan Penguatan Indeologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	90	100	90	90	90	90	90
2.	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Politik dan Masyarakat	%	90	100	90	91	92	93	94
3.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	%	0	70	90	90	90	90	90
4.	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan	%	85	75	85	85	85	85	85

	Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan								
5.	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	%	92	92,00	93	94	95	96	97

Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 terdapat 5 (lima) indikator Kinerja Kunci yaitu:

1. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan target tahun 2027 yaitu 90 %. Target tahun 2025 90 % dengan realisasi 100 %. Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan ini dalam bentuk pelaksanaan peringatan peristiwa bersejarah (bela negara) dan wawasan kebangsaan serta paskibraka.
2. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Politik dan Masyarakat target tahun 2027 yaitu 91 %. Target tahun 2025 yaitu 90 % dengan realisasi 100 %. Melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada pelajar SMA 1 Kecamatan Harau. Kegiatan pendidikan politik tahun 2025 terlaksana 100 persen di karenakan kegiatan diadakan di sekolah disesuaikan dengan program sekolah yaitu P5, diikuti oleh seluruh siswa SMAN 1 Harau. Begitu juga di tahun 2026 dilaksanakan di SMAN 1 Situjuah dan terlaksana 100 persen. Untuk di tahun 2027 di rencanakan untuk kelompok sasaran yang berbeda dari 2 tahun sebelumnya yaitu masyarakat atau kelompok masyarakat.
3. Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif target tahun 2027 yaitu 90 %. Target tahun 2025 yaitu 0 % dengan realisasi 70 %. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk verifikasi dan monitoring kegiatan organisasi kemasyarakatan yang terdata pada tahun 2025.
4. Persentase kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan target tahun 2025 85 % dengan realiasi 85 %. Realisasi fisik kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama tercapai sesuai target, namun untuk realisasi keuangan tidak tercapai dikarenakan pembayaran honor tim Forum Kerukunan Umat Beragama yang tidak dibayarkan kepada anggota tim karena ketidakhadiran yang bersangkutan dalam pelaksanaan kegiatan terkait.
5. Persentase penyelesaian konflik sosial yang ditangani target tahun 2025 yaitu 90 % dengan realisasi 87 %. Realisasi fisik tidak dapat dicapai sesuai target, karena ada beberapa konflik sosial tersebut tidak bisa diselesaikanya ditingkat bawah, karena berlanjut ke pihak yang berwenang melalui APH.